



**TAK MASUK KATEGORI KOTA LAYAK HUNI VERSI IAP INDONESIA**

# MINIM RUANG PUBLIK BIKIN JOGJA MAKIN SUMPEK

Beberapa waktu lalu Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia melakukan survei tingkat kenyamanan hunian di 26 kota. Melibatkan 200 responden di masing-masing wilayah. Hasilnya, Kota Jogja tak masuk tujuh besar kota layak huni 2017, tapi hanya sebagai *average tier city* atau peringkat rata-rata.

**WAKIL** Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Pande Made Kutaneegara menilai, ketidaknyamanan s u a s a n a Kota Jogja tak begitu mencolok

**INSIGHT**

Instansi	karena masyarakatnya masih kuat dengan budaya <i>ewuh pakeuh</i> , saling menjaga dan <i>rumangsa</i> . Itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan Jogja tidak meledak ke luar dan terkesan <i>adem ayem</i> . "Inilah yang disebut dengan <i>hidden transcript</i> . Kalau begitu tentu ada <i>hidden conflict</i> . Nah, <i>hidden</i> tak <i>nyaman</i> juga ada. Coba kalau terjadinya di kota lain, mungkin sudah menyebar kemana-mana," ungkapnya = <th style="width: 20%;">Wifat</th> <th style="width: 20%;">Tindak Lanjut</th>	Wifat	Tindak Lanjut
1. ....	Baca <i>Minim...</i> Hal 7	Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. ....		ra	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. ....			<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. ....			
5. ....			

Yogyakarta, .....  
Pit. Kepala

Dikatakan, seseorang yang bertahan di suatu tempat bukan semata-mata karena kondisi fisiknya. Tapi kondisi sosialnya yang juga nyaman. Ketika fisik kurang nyaman, tapi sosialnya nyaman, maka orang tetap merasa nyaman untuk tinggal. Kondisi Kota Jogja sendiri, menurut Made, tergolong tidak layak huni dari segi kenyamanan.

"Jogja mau dibentuk jadi kota yang seperti apa, itu tidak tampak. Sangat tidak teratur. Begitu banyak iklan yang berserakan, sementara infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung kenyamanan hidup kurang tersedia," ungkap pengamat sosial yang juga ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan DJI.

Made melihat, seiring makin padatnya penduduk membuat kondisi Jogja makin mengkumuh. Hal ini makin memperparah ketidaknyamanan huni Kota Jogja. "Selama ini orang berpikir hanya pinggir kali yang kumuh, padahal sekarang sudah mulai ke daratan," kata Made.

Hal itu disebabkan oleh sistem warisan dalam tata sosial masyarakat. Setiap orang tua cenderung mewariskan semua harta dan benda kepada anak-anaknya. Keluarga miskin yang sulit membeli tanah atau rumah di luar Jogja. Yang terjadi adalah membagi rumah yang sudah sempit kepada anak-anaknya. "Disekat-sekat pula," beber dosen Antropologi UGM ini.

Menurut Made, relasi sosial Jogja di masa lalu sangat tinggi. Sebab, Jogja dulunya terbentuk dari kampung urban. Masyarakat hidup dalam struktur dan kultur kampung, bukan perkotaan. Relasi sosial itu kini mulai mele-

mah, sehingga memicu ketidaknyamanan secara sosial. Karena masyarakat Jogja semakin individualis.

"Sudah *sumpek* di luar, pertemanan lemah. Mestinya ketika daya fisiknya tidak mendukung, daya sosialnya harus naik, agar seimbang," ungkapnya. "Ketika di rumah sudah *sumpek*, ke luar juga *sumpek*, lalu ke mana harus lari?" lanjut Made bernada tanya.

Menurut Made, Jogja masih butuh banyak ruang publik sebagai tempat "pelarian" dari *kesumpekan*. Pemerintah harus lebih berani membebaskan lahan untuk dijadikan ruang publik. Selain harus diperbanyak, ruang publik harus ditata untuk menciptakan kenyamanan. Baik secara fisik maupun sosial. Memungkinkan banyak orang berinteraksi di ruang publik tersebut. Made melihat, sejauh ini ruang publik yang tersedia hanya menjadi objek sekadar taman. Bahkan ada yang malah berubah fungsi untuk warung tenda pedagang kaki lima atau lahan parkir. Kondisi ini tak memungkinkan seseorang yang mengalami *kesumpekan* untuk lari ke ruang publik. Padahal, tempat itu mestinya bisa menjadi sarana menyelesaikan persoalan kenyamanan dari segi sosial.

Menciptakan ruang publik baru tak harus membeli lahan. Tapi bisa dengan memaksimalkan fungsi ruang publik yang ada. Misalnya, bangunan dan lingkungan sekolah. Saat hari libur, Sabtu-Minggu, lingkungan sekolah bisa difungsikan sebagai ruang publik bagi masyarakat sekitar.

"Kembangkan sekolah yang rindang, banyak tanaman dan tempat main. Itu akan membuka ruang isolasi *private* sekolah menjadi *private* kampung. Jadi

pada Sabtu-Minggu itu milik kampung, Senin sampai Jumat milik sekolah," jelasnya.

Konsep itu sekaligus diharapkan bisa meminimalisasi kebiasaan akan bermalis *gadget* atau sekadar jalan ke *mall*. Para lansia yang juga tidak punya ruang interaksi juga bisa diakomodasi lewat kegiatan senam pagi mingguan. Dengan begitu, masyarakat pun akan memiliki rasa *handarbeni* dan ikut menjaga serta merawat lingkungan sekolah terkait.

Menanggapi hasil survei IAP, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menilai banyak kota yang saat ini memiliki hasrat untuk meraih predikat layak huni. Untuk Jogja sendiri, HP, sapaannya, mengklaim tak lagi layak huni, tapi justru menuju nyaman huni. Dia mengukurnya dari angka harapan hidup di Jogja yang mencapai 74 tahun, termasuk tertinggi di Indonesia. Kategori nyaman huni, menurut HP, jika tiga kebutuhan dasar terpenuhi. Yaitu kebersihan, keamanan, dan ketertiban. "Nyaman huni itu mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya," ucapnya.

HP mengklaim, tak ada infrastruktur yang berkurang di Kota Jogja. Penurunan prosentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) lebih disebabkan oleh perubahan perhitungan. RTH di Kota Jogja 18,76 persen atau 6,09 kilometer persegi dari total luas wilayah Kota Jogja 32,5 kilometer persegi. "Sebelumnya bisa 33 persen, prosentase turun bukan RTH berkurang tapi parameter saja yang berubah," ungkap HP.

Saat ini pemkot berupaya membeli sebanyak mungkin tanah perkotaan untuk dijadikan bank tanah Kota Jogja. Tanah-tanah tersebut untuk pengembangan ruang publik.

Sementara pembangunan kota diarahkan untuk lebih berpihak pada lima hal. Yaitu kepedulian gender, kelompok miskin, lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

"Pembangunan kota akan kami selaraskan dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Adapun beberapa program yang telah berjalan, seperti kampung ramah anak, kampung panca tertib, kampung tanggung bencana, hingga kampung bebas rokok. "Jogja juga punya 33 kampung sayur yang dikelola warga setempat," jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad menambahkan, pemkot saat ini memposisikan masyarakat sebagai aktor pembangunan. Mereka dilibatkan mulai perencanaan.

Terkait hasil survei IAP Indonesia, Edy mengaku belum mendapat hasilnya. Termasuk parameter apa saja yang digunakan. Kendati demikian, Edy menilai, survei yang didasarkan atas persepsi bisa dipahami secara berbeda oleh tiap individu. Contohnya masalah kemacetan. Secara transportasi memang tidak nyaman, tapi berkah bagi pelaku industri pariwisata dengan banyaknya wisatawan.

Kendati demikian, Edy sepakat bahwa untuk menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat dari sisi transportasi harus dilakukan berbagai upaya. Seperti penyediaan kantong parkir dan mengatur agar bus ukuran besar tidak menumpuk di tengah kota.

Sekadar diketahui, survei IAP Indonesia berbasis pendapat masyarakat kota tentang tempat tinggal masing-masing. Parameternya dari aspek pendidikan, fasilitas kesehatan, pangan, pe-

nataan pedagang kaki lima, transportasi, ketersediaan air bersih, hingga tempat ibadah.

adapun tujuh besar kota layak huni berdasarkan survei tersebut antara lain, Solo, Palembang,

Balikpapan, Denpasar, Tangerang Selatan, Semarang, dan Banjarmasin. (cr3/pra/yog/rg)

# Macet hingga Permukiman Kumuh

**HASIL** survei IAP Indonesia memang bukan indikasi mutlak sebuah kenyamanan huni suatu wilayah perkotaan. Kendati demikian, Sekprov DIJ Gatot Saptadi berpendapat bahwa hasil survei tersebut bisa menjadi masukan dalam perencanaan tata kota yang lebih baik. "Seberapa banyak sih yang tak nyaman tinggal di Jogja," katanya.

Seumpama ada warga Jogja merasa tak nyaman, Gatot menduga lebih disebabkan masalah kemacetan lalu lintas. "Membangun kantong-kantong parkir baru menjadi

salah satu upaya pemprov untuk mengatasi persoalan tersebut. Supaya masyarakat tetap nyaman saat berkendara di jalan raya," tuturnya.

Sementara Kabid Perencanaan Bappeda DIJ Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan ditargetkan pada dua hal pokok. Yakni pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah ■

► Baca *Macet...* Hal 7

# Macet hingga Permukiman Kumuh

*Sambungan dari hal 1*

Rencana membangun ketimpangan wilayah dengan meningkatkan kawasan bangkitan baru. Misalnya, mengoptimalkan keberadaan desa wisata untuk mendukung sektor pariwisata. Sedangkan di sektor pembangunan wilayah, pemprov mendorong pengentasan kawasan

kumuh. "Akhir 2019 ditarget 0 persen kawasan kumuh," katanya. Menurut Dwi, kawasan kumuh masih didominasi lingkungan pinggiran sungai.

Plt Kepala Dinas PUP ESDM DIJ M. Mansur menambahkan, pemprov menyiapkan dana Rp 30 miliar untuk pengentasan kawasan kumuh dalam kurun 2017-2019. "Ada 15 kecamatan

di DIJ yang diidentifikasi masuk kawasan kumuh," katanya.

Khusus Kota Jogja, kata Mansur, menyedot anggaran cukup besar. Mencapai Rp 12 miliar. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Tegalrejo, Umbulharjo, Mantrijeron, Jetis, Kotagede, Gondokusuman, Ngampilan, dan Mergangsan. (bhn/yog/rg)



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

**PERMUKIMAN PADAT:** Kawasan hunian penduduk di pinggiran Kali Code menjadi salah satu parameter ketidaknyamanan di Kota Jogja. Foto diambil kemarin (25/3).



SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA

**LEBIH SEGAR:** Suasana daerah tetangga Kota Jogja di wilayah Piyungan tampak lebih hijau dengan hamparan sawah.



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

**HARUS DIPERBANYAK:** Anak-anak bermain bola di RTH Plaza Ngasem, Kota Jogja kemarin (25/3).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Yogyakarta, 03 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005